

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan bangsa yang besar dan terdiri atas ribuan pulau. Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau yang tersebar dari ujung barat Sabang sampai Merauke. Akan tetapi, hanya 13.466 pulau yang telah memiliki nama dan merupakan data yang valid menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, terdapat 1.340 suku bangsa di Indonesia. Keberagaman bahasa sebanyak 1.211 bahasa dengan 1.158 bahasa daerah diantaranya memberikan nilai keberagaman terhadap bangsa Indonesia, meskipun memiliki bahasa nasional yaitu Bahasa Indonesia.

Keberagaman inilah yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan multikulturalisme terbesar di dunia. Multikultural merupakan keadaan masyarakat yang terdiri atas keberagaman nilai agama, budaya, suku bangsa, ras, etnik, bahasa, dan status sosial. Multikulturalisme (Azra, 2007) pada dasarnya adalah:

Pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan realitas pluralitas agama dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme juga dapat dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik.

Sedangkan menurut Parekh (1997), masyarakat multikultural adalah “masyarakat yang terdiri dari beberapa jenis komunitas budaya dengan semua manfaat, dengan sedikit perbedaan dalam konsepsi dunia, sistem makna, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat istiadat dan kebiasaan.”

Multikulturalisme berasal dan dikembangkan dari konsep pluralisme (keberagaman). Seperti yang dikemukakan oleh Taylor (1994, hlm. 22) berikut ini:

What the word multicultural does, then, which is different from the other terms mentioned is to create not just a sense of differences but also to recognize those differences as springing from a universally shared

attachment of importance to culture and to an implicit acknowledgement of the equality of all cultures.

Apa yang dimaksud dengan multikultural disini berbeda dengan istilah lain yang biasanya disebutkan. Artinya multikultural bukan hanya dimaknai sebagai keberagaman perbedaan, akan tetapi untuk mengenali perbedaan-perbedaan sebagai nilai budaya bersama yang penting dan universal serta sebagai pengakuan implisit terhadap kesetaraan semua budaya. Jika dikaitkan dengan konteks bangsa Indonesia, keberagaman ini akan menjadi nilai positif jika kita bisa menjaga dan melaksanakan nilai-nilai keberagaman yang bertanggung jawab agar terciptanya nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang dicanangkan oleh para *founding fathers*, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dalam arti fisik, psikis, dan kultural. Rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini yang pada akhirnya akan mewujudkan solidaritas nasional (*national solidarity*) yang dilandasi nilai-nilai dasar (*core values*) dalam kehidupan bersama.

Namun dalam pelaksanaannya, keberagaman atau kemajemukan ini justru akan menimbulkan problematika, misalnya konflik antar agama, bentrok antar suku, tawuran yang terjadi diantara pelajar atau masyarakat, dan sebagainya. Seperti halnya yang dikemukakan Barndsford (2000, hlm. 25) bahwa:

Multikultur merupakan suatu tantangan yang mengedepankan majemuknya nilai-nilai, mekanisme dan struktur sosial dalam bingkai *human being*. Dalam kesadaran pluralisme manusia dihadapkan pada proses pembelajaran yang terus menerus bergulir sepanjang hidupnya terhadap sesuatu di luar pribadi dan identitas monokulturnya.

Fenomena keberagaman atau multikulturalisme di Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai ancaman, yaitu ancaman dari dalam negeri dan dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri terhadap multikulturalisme di Indonesia ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatisme. Kelompok-kelompok yang melakukan gerakan separatisme ini berawal dari adanya pemekaran wilayah berdasarkan otonomi daerah. Akan tetapi ide pemekaran wilayah yang tidak rasional dan hanya memihak kepada golongan tertentu, hanya menimbulkan permasalahan berupa ancaman pemisahan wilayah dan lepas dari negara

Indonesia. Gerakan separatisme juga bisa disesbabkan oleh adanya radikalisme keagamaan atau terorisme, misalnya Republik Maluku Selatan (RMS), Operasi Papua Merdeka (OPM), dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia dan menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat agama Islam.

Degradasi nilai, moral, dan etika kian hari semakin menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sudah mengalami distorsi/disorientasi nilai. Masyarakat semakin kehilangan orientasi atau pegangan hidup, semakin jauh dari nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupannya. Karena tidak adanya orientasi atau pegangan hidup, masyarakat mudah terhasut dengan berbagai informasi yang belum jelas kebenarannya, atau bahkan hanya *hoax* yang dilontarkan oleh provokator. Hal ini ditandai dengan maraknya perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat dan dianggap lumrah, semakin menurunnya pelaksanaan nilai-nilai budi pekerti dan solidaritas sosial.

Selain ancaman dari dalam negeri, ancaman dari luar negeri pun menjadi faktor pendorong tumbuh suburnya berbagai permasalahan multikulturalisme di Indonesia. Arus globalisasi berdampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Bahkan Huntington meramalkan akan terjadinya benturan antarperadaban akibat faktor politik, sosial, budaya, ekonomi, ras, dan agama. Kemudian Joel Spring (2008, hlm. 303) mengidentifikasi empat interpretasi globalisasi:

1. *World culturalist (neo-institutionalist), which sees globalization as a process of all cultures being integrated into a single global culture;*
2. *World systems theory, which regards globalization as a process to legitimize the powers and actions of rich nations by inculcating their values into periphery nations;*
3. *Postcolonialist, which views globalization as an effort to impose particular economic and political agendas that benefit rich nations on the global society; and*
4. *Culturalist, which considers globalization as a process of local actors borrowing from multiple models in the global flow of educational ideas.*

Globalisasi merupakan fenomena semua budaya terintegrasi ke dalam suatu budaya tunggal dan proses legitimasi kekuasaan atau agenda politik ekonomi dari negara berkuasa ke negara-negara pinggiran. Misalnya dampak

negatif dari arus globalisasi berupa kebebasan individu (liberalisme) yang semakin meningkat dan terbukanya akses komunikasi dan informasi yang tanpa batas. Tentunya hal ini akan memberikan implikasi dan konsekuensi yang positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak negatif dari meningkatnya liberalisme dan kebebasan informasi adalah bergesernya nilai-nilai kehidupan masyarakat ketimuran menjadi kebarat-kebaratan (*westernisasi*). Pola hidup yang sopan santun dan sederhana berubah menjadi gaya hidup eksklusif, konsumtif, dan materialis. Bergesernya nilai-nilai kehidupan tersebut pada akhirnya akan menyebabkan hilangnya jati diri, kepercayaan diri, dan karakter bangsa Indonesia.

Permasalahan tersebut menjadi semakin terbukti sejak adanya globalisasi yang berujung pada peningkatan interaksi dan gesekan antarbudaya dan menyebabkan meningkatnya berbagai ketegangan, tarikan dan klaim yang terkait identitas, khususnya masalah agama yang dapat menjadi sumber perdebatan potensial. Di era globalisasi saat ini, masyarakat lebih mencerminkan realitas kehidupan yang ditandai dengan perubahan yang sangat cepat. Masyarakat telah mengalami pergeseran nilai dari yang tadinya berpusat pada hal yang spiritual ke masyarakat yang berpusat pada hal-hal material, serba konsumtif duniawi (Milanesi & Baljek, 1990; Waruwu, 2010, hlm.34).

Dengan kata lain, sebaiknya globalisasi dipandang sebagai suatu proses multidimensi dan multiarah yang melibatkan aliran segala macam hal (modal, komoditas, informasi, ide, kepercayaan, manusia) yang semakin kencang dan meningkat di sepanjang aksis yang terus-menerus berubah secara perlahan. Keberagaman hendaknya dipandang sebagai nilai perbedaan yang saling terkait dan saling mendukung bukanlah sebagai penghalang dan perlu dijadikan sebagai pemersatu bangsa.

Ancaman dari dalam negeri berupa gerakan separatisme ternyata mendapatkan dukungan atau bantuan dari pihak dan negara lain secara tersembunyi. Hal ini merupakan ancaman yang sangat krusial untuk segera diselesaikan, karena akan mengancam kelangsungan negara Indonesia. Bantuan tersebut bertujuan untuk memecah belah rasa persatuan dan kesatuan bangsa mulai dari lapisan masyarakat paling bawah sampai kepada elit politik yang

berkuasa. Ancaman dari luar negeri pun dapat berupa munculnya klaim-klaim negara lain terhadap wilayah dan kebudayaan asli Indonesia, seperti konflik perebutan wilayah Pulau Ambalat, kesenian Reog Ponorogo, Angklung, Batik, dan lain-lain.

Munculnya berbagai ancaman yang menyebabkan konflik multikulturalisme di Indonesia akan menyebabkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang jauh dari nilai-nilai keadaban sebagai warga negara (*civic virtue*). Padahal, keadaban warga negara merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam suatu negara. Nilai-nilai keadaban warga negara (*civic virtue*) seperti tanggung jawab dan keadilan akan membuat seseorang menjadi warga negara yang baik dan cerdas.

Menurut Harvey (1996, hlm. 70), jika negara dengan masyarakat yang multikultural ingin bertahan (*survive*) harus melakukan dua hal seperti menghancurkan dimensi multikultural pada masyarakat yang ada agar menjadi salah satu budaya yang dominan. Hal ekstrim ini mengacu pada tindakan genosida yang tragis dan sangat terkenal pada awal abad ke-20. Tindakan pemusnahan masyarakat multikultural ini bertujuan untuk menjadikan masyarakat yang monokultur, seperti di Yugoslavia dan pembantaian di Afrika Tengah. Langkah alternatif lain menurut Harvey (1996, hlm.79) adalah sebagai berikut:

The alternative to any attempt to create a monocultural society is to celebrate and encourage multiculturalism in the expectation that citizens who are proud of their culture and see that culture being endorsed by the state will be anxious to join in common citizenship with members of other cultural groups to protect the liberal tolerance which is so important for them. in such a perspective the enhancement of a sense of local belonging and an awareness of diversity paradoxically encourage a strong commitment to national goals and institutions.

Upaya alternatif untuk menciptakan masyarakat monokultural adalah untuk menghargai dan mendorong multikulturalisme dengan harapan bahwa warga negara bangga dengan budaya mereka. Warga negara tersebut akan bergabung dengan anggota kelompok budaya lainnya untuk melindungi toleransi liberal yang sangat penting bagi mereka. Dalam hal ini seperti peningkatan rasa memiliki nilai-nilai lokal dan kesadaran akan keanekaragaman mendorong

komitmen yang kuat untuk tujuan dan lembaga-lembaga nasional. Indonesia tidak perlu melakukan upaya alternatif tersebut untuk membentuk masyarakat yang monokultur. Bangsa Indonesia harus bangga dan tetap menjadi bangsa yang multikultur (beragam). Akan tetapi, yang perlu dilakukan adalah menjaga bangsa multikultur tersebut agar tetap hidup dan terjaga kelangsungannya. Misalnya dengan menumbuhkan rasa saling memiliki, persatuan dan kesatuan, dan menghargai setiap nilai budaya masing-masing sebagai suatu kekayaan bangsa yang harus dihormati.

Penghormatan tersebut harus didasarkan pada penilaian terhadap isi atau jenis kebudayaan yang memungkinkan bagi para anggotanya. Karena setiap kebudayaan memberikan stabilitas dan arti terhadap kehidupan manusia, menyatukan para anggotanya sebagai satu komunitas, menampilkan energi kreatif, dan sebagainya, kebudayaan tersebut layak memperoleh penghormatan (Parekh, 2008). Jika dihadapkan pada kebudayaan-kebudayaan lain, kita harus bisa menghormatinya, karena setiap anggota masyarakat tersebut memiliki hak yang sama untuk dihormati dan menjunjung tinggi kebudayaan tersebut. Penghormatan terhadap perbedaan akan tercermin ke dalam perilaku warga negara dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi kebajikan yang melekat dalam dirinya. Kebajikan warga negara ini harus tetap dilaksanakan meskipun di lingkungan yang multikultural atau beragam karena dapat menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa (Watson, 2000).

Selain harus menumbuhkan rasa saling menghormati, upaya lain untuk mewujudkan warga negara Indonesia yang beradab dan bermoral adalah dengan dilaksanakannya upaya preventif oleh bidang pendidikan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Upaya preventif tersebut bisa dilakukan di bidang pendidikan untuk mengatasi berbagai permasalahan multikulturalisme yang terjadi. Pendidikan di Indonesia harus peka dan tanggap terhadap arus perputaran globalisasi, khususnya dalam menanggapi fenomena multikulturalisme. Maka pencarian bentuk pendidikan alternatif sangat diperlukan, yaitu suatu bentuk pendidikan yang berusaha menjaga kebudayaan suatu masyarakat dan memindahkannya kepada generasi berikutnya,

menumbuhkan tata nilai, memupuk persahabatan antara siswa yang beraneka ragam suku, ras, dan agama, mengembangkan sikap saling memahami. Karakteristik utama yang harus dimunculkan adalah bagaimana budaya dan multikulturalisme tersebut dapat dimengerti (Taylor & Francis, 2013). Oleh sebab itu, pendidikan multikultural adalah jawaban atas beberapa problematika kemajemukan itu.

Upaya dalam bidang pendidikan ini sejalan dengan tujuan nasional Negara Indonesia. Salah satu cita-cita bahkan tujuan nasional Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, harus dilaksanakan suatu sistem pendidikan di berbagai daerah bahkan secara nasional yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat pendidikan dan mencerdaskan seluruh kehidupan bangsanya. Bangsa cerdas adalah bangsa yang memiliki keadaban sebagai warga negara (*civic virtue*).

Dalam Ali (2009, hlm. 35) disebutkan bahwa salah satu visi pembangunan nasional tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembentukan warga negara yang beradab ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang melalui pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang bukan hanya cerdas dalam intelektualitasnya, tetapi juga memiliki akhlak mulia, menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab terhadap negaranya sehingga menjadi warga negara beradab yang bermartabat. Idealisme pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Secara filosofis, sosio-politis dan psikopedagogis, idealisme tersebut merupakan misi suci (*mission sacre*) dari pendidikan kewarganegaraan (Winataputra, 2008, hlm. 2).

Sejalan dengan Undang-Undang di atas, Cogan dan Derricott (1998, hlm. 13) menegaskan bahwa:

A citizen was defined as a constituent member of society. Citizenship, on the other hand, was said to be a set of characteristics of being a citizen. And finally, citizenship education, the underlying focal point of the study, was defined as the contribution of education to development of those characteristics of being a citizen.

Warga negara adalah anggota masyarakat, dan untuk menjadi warga negara harus mendapatkan pengajaran dari Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kontribusi dalam bidang pendidikan untuk membangun warga negara yang berkarakter. Pendapat di atas menegaskan bahwa amanat untuk mencetak warga negara yang baik dan beradab berada pada Pendidikan Kewarganegaraan.

Oleh karena itu, dirasa perlu adanya pendidikan yang memberikan wawasan multikultural kepada peserta didik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mencetak warga negara yang berkarakter, beradab, dan menghargai keragaman yang ada. Pendidikan multikultural mengapresiasi keragaman budaya sebagai realitas objektif dalam suatu kehidupan masyarakat, mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan, dan menciptakan budaya akademik yang toleran dan inklusif (Mahfud, 2011). Sama halnya dengan gagasan dari Banks yang merumuskan:

Pendidikan Multikultural adalah konsep atau ide sebagai suatu rangkaian kepercayaan (*set of believe*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup,

pengalaman sosial, identitas pribadi dan kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara.

Azra (2006, hlm.153) berpandangan bahwa “pembentukan multikultural Indonesia yang sehat tidak bisa secara *taken for granted* atau *trial and error*. Sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, *integrated*, dan berkesinambungan.” Salah satu strategi penting itu adalah dengan adanya Pendidikan Multikultural yang dapat berlangsung dalam *setting* pendidikan formal atau informal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendidikan Multikultural tersebut diarahkan untuk mewujudkan kesadaran, toleransi, pemahaman dan pengetahuan yang mempertimbangkan perbedaan cultural, dan juga perbedaan dan persamaan antar budaya dan kaitannya dengan pandangan dunia, konsep, nilai, keyakinan, dan sikap (Saha, dalam Aly, 2005, hlm. 47).

Pendidikan Multikultural juga bertujuan untuk mencegah dan merespon dampak arus globalisasi dan fenomena konflik etnis, sosial budaya, yang sering muncul di kalangan masyarakat Indonesia yang majemuk. Dengan adanya Pendidikan Multikultural ini diharapkan mampu memberikan pemahaman sehingga masyarakat mendapatkan kesadaran akan pentingnya saling menghormati martabat manusia, menghargai keragaman yang tumbuh, dan menghindari konflik sebagai cara pemecahan masalah yang timbul.

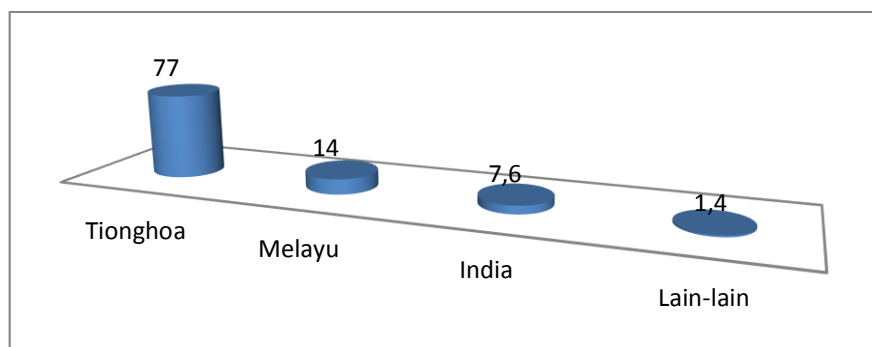
Berkaitan dengan hal di atas, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam penyampaian nilai-nilai keberagaman dalam Pendidikan Multikultural. Seperti yang diamanatkan dalam Pasal 37 bagian Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.” Pendidikan Multikultural harus diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia secara nasional dan komprehensif yang diimbangi dengan pengembangan budaya kewarganegaraan multikultur Indonesia. Budaya kewarganegaraan tersebut harus berintikan *civic virtue* atau keadaban kewarganegaraan. Keadaban kewarganegaraan harus terpancar dari nilai-nilai Pancasila yang secara substantif mencakup keterlibatan aktif warga negara, hubungan kesejajaran, saling percaya,

toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan multikultur.

Warga negara yang menjadi sasarannya adalah seluruh warga negara Indonesia, khususnya warga negara muda yang berada atau tinggal di negara lain yang multietnis/multikultural seperti Singapura. Warga negara muda yang mayoritas berstatus sebagai peserta didik ini harus memposisikan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang berada di lingkungan sekolah Indonesia Singapura dengan peserta didik lain yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, maupun luar negeri. Selain itu, peserta didik yang berstatus warga negara Indonesia ini juga harus bisa hidup berdampingan dan saling menghargai dengan masyarakat Singapura sebagai negara yang multikultural.

Berdasarkan data hasil sensus tahun 2010, Singapura memiliki penduduk kurang dari 5,5 juta jiwa dengan struktur umur yang beragam. Negara ini terdiri atas tiga kelompok etnis yang besar, yaitu Tionghoa, Melayu, dan India. Jumlah persebaran kelompok etnis tersebut dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 1.1 Kelompok Etnis di Singapura



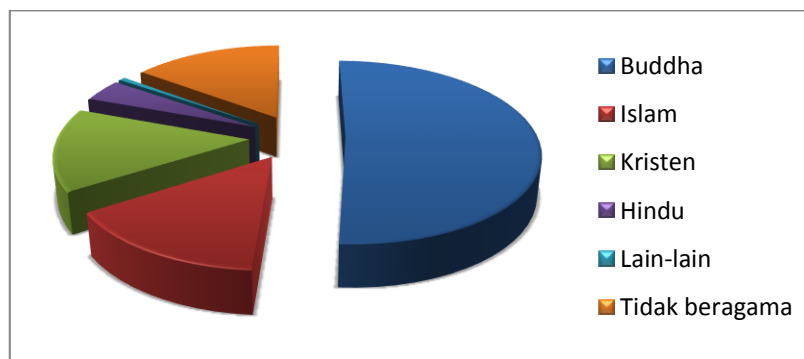
Sumber: id.m.wikipedia.org/demografisingapura

Singapura memiliki empat bahasa resmi, yaitu Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Bahasa Kebangsaan adalah bahasa Melayu, walaupun penggunaan bahasa Inggris lebih umum. Dalam berbagai fasilitas umum yang ada, seperti Bis, MRT, LRT, petunjuk arah, dan toilet umum menggunakan lima bahasa pengantar, diantaranya bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, Tamil, dan Arab.

Agama yang paling banyak dianut di Singapura adalah agama Budha yaitu sebanyak 51 persen; Islam 14,9 persen; Kristen 14,9 persen; dan agama lainnya

seperti Sikh, Konghucu sebanyak 0,6 persen. Sebanyak 14,8 persen dari penduduk Singapura ternyata menyatakan diri tidak beragama. Berikut adalah perbandingan agama yang dianut:

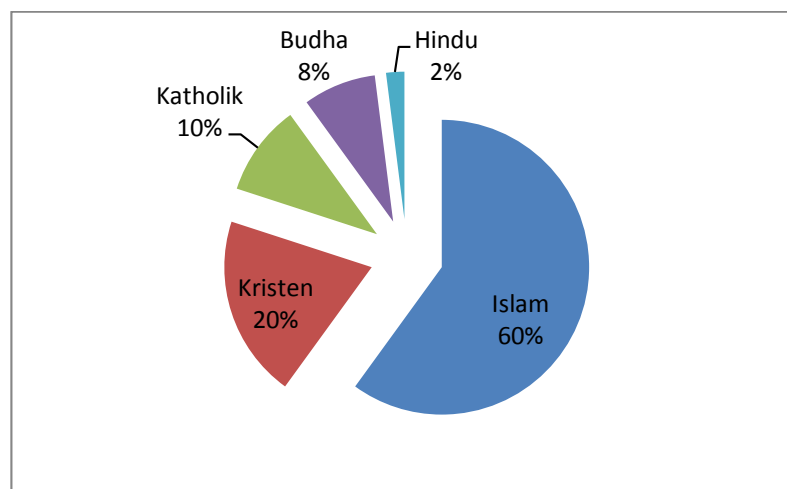
Garfik 1.2 Agama yang Dianut di Singapura



Sumber: id.m.wikipedia.org/demografisingapura

Kondisi Sekolah Indonesia Singapura juga dapat dikatakan sebagai lingkungan yang multikultur. Jumlah siswa dari jenjang TK sampai SMA adalah 157 siswa dengan keragaman etnis dan agama yang dianutnya. Siswa di sekolah ini berasal dari suku Sunda, Jawa, Batak, Tionghoa, dan lain-lain. Agama yang dianutnya pun beragam, yaitu sebanyak 60 persen penganut agama Islam, dan Kristen sebanyak 20 persen. Berikut adalah data siswa berdasarkan agama yang dianutnya:

Grafik 1.3 Data Siswa Berdasarkan Agama yang Dianutnya



Sumber: Dokumentasi Sekolah Indonesia Singapura

Dengan adanya keberagaman di Sekolah Indonesia Singapura tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Pendidikan Multikultural untuk mengembangkan keadaban kewarganegaraan di Sekolah Indonesia Singapura yang dituangkan ke dalam judul “Persepsi Siswa tentang Pendidikan Multikultural untuk Mengembangkan *Civic Virtue* (Studi Deskriptif terhadap Siswa SMP dan SMA di Sekolah Indonesia Singapura)”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Pendidikan Multikultural terhadap pengembangan *civic virtue* siswa SMP dan SMA di Sekolah Indonesia Singapura. Untuk lebih memfokuskan dalam penelitian ini, maka penulis membatasinya dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi siswa tentang Pendidikan Multikultural untuk mengembangkan *civic virtue* di Sekolah Indonesia Singapura?
2. Bagaimana gambaran *civic virtue* siswa dalam penerapan Pendidikan Multikultural di Sekolah Indonesia Singapura?
3. Bagaimana hubungan antara Pendidikan Multikultural dengan *civic virtue*?
4. Bagaimana pengaruh Pendidikan Multikultural terhadap pengembangan *civic virtue* siswa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, secara umum tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk mengkaji pengaruh Pendidikan Multikultural terhadap pengembangan *civic virtue* siswa SMP dan SMA di Sekolah Indonesia Singapura. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan persepsi siswa tentang Pendidikan Multikultural untuk mengembangkan *civic virtue* di Sekolah Indonesia Singapura;
2. Mengidentifikasi gambaran *civic virtue* siswa dalam penerapan Pendidikan Multikultural di Sekolah Indonesia Singapura;

3. Mengetahui hubungan antara Pendidikan Multikultural dengan *civic virtue*;
4. Mengetahui pengaruh Pendidikan Multikultural terhadap pengembangan *civic virtue* siswa.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

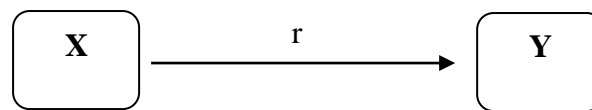
- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atas pengembangan keilmuan mengenai Pendidikan Multikultural terhadap pengembangan *civic virtue*.
- b. Memberikan pemahaman tentang konsep Pendidikan Multikultural untuk lembaga, institusi, pemerintah, dan semua pihak terkait.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengkajian dan acuan guru-guru lainnya bahwa Pendidikan Multikultural mampu memberikan sumbangsih terhadap pengembangan *civic virtue* siswa.
- b. Memberikan informasi tentang inovasi pembelajaran PKn yang efektif terhadap pengembangan *civic virtue* siswa.
- c. Pendidikan Multikultural dalam mata pelajaran PKn ini dapat diorganisasikan dan dihimpun dalam sebuah kegiatan, khususnya pembiasaan (habitiasi) di sekolah dan lingkungan masyarakat yang lebih luas.

E. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini berupa variabel bebas dan variabel terikat. Berikut adalah rincian variabel tersebut: Pendidikan Multikultural (X) dan sebagai variabel bebas dan *Civic Virtue* Siswa (Y) sebagai variabel terikat. Hubungan keterkaitan antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan hubungan antar variabel tersebut, antar variabel memiliki sifat hubungan simetris yang bersandar pada pendapat yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2010, hlm. 68) memaparkan bahwa ada empat kelompok hubungan simetris yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedua variabel merupakan indikator sebuah konsep yang sama;
2. Kedua variabel merupakan akibat dari faktor yang sama;
3. Kedua variabel berkaitan secara fungsional; dan
4. Kedua variabel mempunyai hubungan yang kebetulan semata.

Maka berdasarkan kelompok hubungan simetris tersebut, variabel dalam penelitian ini memiliki hubungan simetris dan jika dianalisis berdasarkan indikator berkaitan secara fungsional .

F. Hipotesis Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Ha : Terdapat hubungan positif signifikan antara Pendidikan Multikultural dengan *civic virtue* siswa.
Ho : Tidak terdapat hubungan positif signifikan antara Pendidikan Multikultural dengan *civic virtue* siswa.
2. Ha : Pendidikan Multikultural berpengaruh positif signifikan terhadap *civic virtue* siswa.
Ho : Pendidikan Multikultural tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *civic virtue* siswa.

G. Definisi Operasional

1. Pendidikan Multikultural adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan cultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia keseluruhan.
2. *Civic Virtue* siswa atau keadaban warga negara ialah standar moral perilaku yang harus dimiliki oleh seorang siswa sebagai anggota suatu masyarakat agar menjadi warga negara yang beradab, bertanggungjawab, memahami hak dan kewajibannya.

H. Struktur Organisasi Tesis

Peneliti memberikan struktur organisasi penelitian secara sistematis sehingga memudahkan pembaca dalam memahami tesis ini. Penelitian ini terdiri atas lima bab, di antaranya: Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Temuan Penelitian dan Pembahasan, dan Bab V Penutup.

Bab pertama menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, asumsi dan hipotesis penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis; 2) bab dua berupa kajian pustaka, penelitian terdahulu, posisi teoretis peneliti, dan paradigma penelitian; 3) bab tiga meliputi desain penelitian, lokasi, populasi dan sampel penelitian, prosedur penelitian, definisi operasional, operasionalisasi variabel penelitian, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan isu etik; 4) bab empat mencakup deskripsi lokasi penelitian, temuan penelitian yang berisi hasil analisis deskriptif dan hasil pengujian hipotesis serta pembahasan hasil penelitian yang berisi pemaparan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya dikaitkan dengan teori, dalil, kajian pustaka, dan penelitian terdahulu; 5) bab lima meliputi simpulan, yang akan menyajikan uraian singkat mengenai hasil pembahasan penelitian dalam bentuk rekonseptualisasi peneliti, sedangkan implikasi dan rekomendasi ditujukan kepada para pembuat kebijakan, kepada para

pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya, dan kepada pemecahan masalah di lapangan atau *follow up* dari hasil penelitian.